



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan laporan keuangan Dinas Pertanian tahun anggaran 2025 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Sebagaimana pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual maka tahun 2025 adalah merupakan tahun ketujuh bagi Dinas Pertanian dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual. Selanjutnya laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah daerah atas penggunaan keuangan daerah dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah dan penyelenggaraan operasional pemerintahan, hal tersebut menjadi tolok ukur kinerja pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan pada setiap akhir tahun anggaran. Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan bahwa laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Dengan telah keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, dan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Grobogan Nomor 40 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Grobogan Berbasis Akrual, maka tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas Pemerintah Kabupaten Grobogan yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan Dinas Pertanian adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas Dinas Pertanian atas sumber daya yang dipercayakannya. Laporan Keuangan Dinas Pertanian disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Pertanian selama satu periode pelaporan.



Melalui Laporan Keuangan Dinas Pertanian, para pengguna laporan diharapkan dapat memperoleh informasi untuk menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial, maupun politik.

Laporan Keuangan Dinas Pertanian memuat informasi mengenai:

- 1) Penjelasan atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran;
- 2) Laporan Operasional;
- 3) Laporan Perubahan Ekuitas;
- 4) Neraca;
- 5) Catatan Atas Laporan Keuangan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Dinas Pertanian disusun berlandaskan :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005



Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
16. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 32 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Grobogan;
17. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Grobogan Berbasis Akrua.
18. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Grobogan

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Bab II Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah

- 2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab III Penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah

- 3.1 Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos Laporan Realisasi Anggaran



- 3.1.1 Pendapatan – LRA
- 3.1.2 Belanja
- 3.2 Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos Laporan Operasional
 - 3.2.1 Pendapatan – LO
 - 3.2.2 Beban
- 3.3 Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

- 3.4 Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos Laporan Neraca
 - 3.4.1 Aset
 - 3.4.2 Kewajiban
 - 3.4.3 Ekuitas Dana
- Bab IV Penjelasan atas informasi non keuangan Dinas Pertanian
- Bab V Penutup.



BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.

A. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2025.

Realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2025 secara ringkas adalah sebagai berikut:

- 1) Realisasi Pendapatan sebesar Rp.288.575.000,00 lebih besar jika dibandingkan dengan anggarannya yaitu sebesar Rp.283.000.000,00 atau tercapai 101,96 persen.
- 2) Realisasi Belanja sebesar Rp.46.984.503.827,00 lebih kecil Rp. 2.051.380.173,00 jika dibandingkan dengan anggarannya yaitu sebesar Rp. 49.035.884.000,00 atau tercapai 95 ,81 %.
- 3) Pada realisasi APBD tahun anggaran 2025 terjadi defisit sebesar Rp. 46.984.503.827,00 dengan demikian maka terdapat Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) sebesar Rp. 46.984.503.827,00.

	APBD Tahun 2025		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Surplus Penerimaan/Sisa Pengeluaran
1 Pendapatan dan Belanja			
Pendapatan	283.000.000,00	288.575.000,00	5.575.000,00
Belanja dan Transfer	49.935.884.000,00	46.984.503.827,00	2.951.380.173,00
Surplus/(Defisit)	(49.652.884.000,00)	(46.695.928.827,00)	2.956.955.173,00
2 Pembiayaan			
Penerimaan Pembiayaan			-
Pengeluaran Pembiayaan			-
Pembiayaan Netto	-	-	-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(49.652.884.000,00)	(46.695.928.827,00)	2.956.955.173,00

B. Realisasi Anggaran Tahun 2025 dibandingkan dengan Tahun 2024.

Dibandingkan dengan realisasi pada TA.2024, Pendapatan TA.2025 mengalami kenaikan sebesar Rp.5.575.000,00 atau 1,96 persen. Belanja TA.2025 mengalami penurunan sebesar Rp.23.321.103.325.00 atau 33,03 persen, sedangkan SiKPA mengalami peurunan Rp. 23.321.103.325,00.



2.2 Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan
Belanja TA.2025 terealisasi sebesar 95,81 persen sedangkan realisasi belanja TA 2024 sebesar 97,03 persen. Adapun permasalahan dalam pencapaian target belanja TA.2025 terjadi pada pos Belanja Langsung. Hal ini antara lain disebabkan oleh:

1. Belanja langsung disebabkan
 - Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas.
 - Pelaksanaan kegiatan yang terkendala tidak sesuai jadwal karena menyesuaikan musim.
 - Adanya efisiensi dari pemerintah pusat.



BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, bahwa laporan keuangan pemerintah daerah menyajikan informasi tentang:

- A. Realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran
- B. Laporan perubahan saldo anggaran lebih, yaitu laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi, dan SAL akhir
- C. Laporan operasional, yaitu laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional
- D. Laporan perubahan ekuitas, yaitu laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi, dan ekuitas akhir
- E. Neraca, yaitu laporan yang menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu
- F. Laporan arus kas, yaitu laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

3.1 Rincian dari Penjelasan Masing-masing Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas akun pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Realisasi Pendapatan pada Tahun Anggaran (TA) 2025 adalah sebesar Rp.288.575.000,00 atau mencapai 101,97 persen dari target APBD Perubahan TA. 2025 sebesar Rp.283.000.000,00. Realisasi pendapatan TA. 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp.2.535.000,00 atau 0,89 persen jika dibandingkan dengan realisasi TA. 2024. Realisasi Pendapatan Daerah TA. 2025 berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 288.575.000,00; Pendapatan Transfer sebesar Rp0,00; Lain-lain Pendapatan Yang Sah sebesar Rp0,00.

Realisasi Belanja Daerah dan Transfer pada TA.2025 adalah sebesar Rp. 46.984.503.827,00 atau 95,81 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan TA.2025 sebesar Rp. 49.035.884.000.00.

Realisasi Belanja Daerah TA.2025 mengalami penurunan Rp 23.607.143.325,00 atau 33,44 persen jika dibandingkan dengan TA.2024, Realisasi Belanja Daerah TA.2025 terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp.46.281.544.407,00, Belanja Modal sebesar Rp 702.959.420,00 dan Berdasarkan realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp. 288.575.000,00, maka terjadi Defisit Anggaran pada TA.2025 sebesar (Rp.46.695.928.827,00). Terjadinya Defisit Anggaran dan realisasi Pembiayaan Netto



mengakibatkan Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) TA.2025 sebesar (Rp. 46.695.928.827,00).

Untuk lebih jelasnya perbandingan antara anggaran dan realisasinya selama TA. 2025 dan realisasi TA. 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut:

URAIAN	2025		2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Pendapatan			
Pendapatan Asli Daerah	283.000.000,00	288.575.000,00	286.040.000,00
Pendapatan Transfer	-	-	-
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	-	-	-
Jumlah Pendapatan	283.000.000,00	288.575.000,00	286.040.000,00
Belanja			
Belanja Operasi	48.308.842.000,00	46.281.544.407,00	69.553.344.052,00
Belanja Modal	727.042.000,00	702.959.420,00	1.038.303.100,00
Belanja Tidak Terduga	-	-	-
Transfer	-	-	-
Jumlah Belanja	49.035.884.000,00	46.984.503.827,00	70.591.647.152,00
Surplus/(Defisit)	(48.752.884.000,00)	(46.695.928.827,00)	(70.305.607.152,00)
Pembiayaan			
Penerimaan Pembiayaan	-	-	-
Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-
Pembiayaan Neto	-	-	-
Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran	(48.752.884.000,00)	(46.695.928.827,00)	(70.305.607.152,00)

Uraian selengkapnya dari masing-masing akun laporan realisasi anggaran adalah sebagai berikut:

3.1.1 PENDAPATAN-LRA.....Rp.288.575.000,00

Pendapatan-LRA, adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Realisasi Pendapatan-LRA pada Tahun Anggaran (TA) 2025 adalah sebesar Rp.288.575.000,00 atau mencapai 101,96 persen dari target APBD Perubahan TA 2025 sebesar Rp.283.000.000,00. Realisasi Pendapatan-LRA TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.535.000,00 atau 0,89 persen jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024.

Perbandingan antara anggaran dan realisasi Penerimaan LRA TA 2025 serta realisasi TA 2024 adalah sebagai berikut:



No.	Jenis Penerimaan	2025		2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan Asli daerah Retribusi Jasa Usaha Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00
2	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	250.000.000,00	255.575.000,00	253.040.000,00
Jumlah Belanja		283.000.000,00	288.575.000,00	286.040.000,00

3.1.2. BELANJA– (LRA).....Rp. 46.984.503.827,00

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening bendahara pengeluaran/kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Realisasi Belanja pada TA 2025 adalah sebesar Rp. 46.984.503.827,00 yang berarti mencapai 95,81 persen dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp.49.035.884.000,00 berdasarkan jenisnya, Belanja terdiri atas Belanja Operasi dan Belanja Modal. Perbandingan antara anggaran dan realisasi Belanja TA 2025 serta realisasi TA 2024 adalah sebagai berikut:

No.	Belanja	2025		2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Belanja Operasi	48.308.842.000,00	46.281.544.407,00	69.553.344.052,00
2	Belanja Modal	727.042.000,00	702.959.420,00	1.088.303.100,00
3	Belanja Tidak Terduga	-	-	-
4	Transfer	-	-	-
Jumlah Belanja		49.035.884.000,00	46.984.503.827,00	70.591.647.152,00

1. BELANJA OPERASI.....Rp 46.281.544.407,00

Belanja Operasi meliputi pengeluaran untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek.

Realisasi Belanja Operasi TA 2025 adalah sebesar Rp.46.281.544.407,00 yang berarti mencapai 95,80 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp.48.308.842.000,00. Belanja Operasi terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Bunga, Belanja Subsidi.



Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Belanja Operasi:	2025		2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Pegawai	13.274.268.000,00	12.686.637.372,00	11.709.186.373,00
Belanja Barang dan Jasa	13.268.686.600,00	12.619.146.488,00	25.410.513.870,00
Belanja Bunga	-	-	-
Belanja Subsidi	-	-	-
Belanja Hibah	21.765.887.400,00	20.975.760.547,00	32.433.643.809,00
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-
Jumlah Belanja Operasi	48.308.842.000,00	46.281.544.407,00	69.553.344.052,00

A. Belanja Pegawai.....Rp 12.686.637.372,00

Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 adalah sebesar Rp 12.686.637.372,00 yang berarti mencapai 95,57 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp.13.274.268.000,00. Hal ini berarti Belanja Pegawai lebih besar Rp.977.450.999,00 atau 8,34 persen dari realisasi TA 2024.

Rincian Belanja pegawai disajikan dalam tabel berikut:

No.	Belanja Pegawai	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)
1	Gaji dan Tunjangan	9.106.306.615,00	8.628.740.992,00	94,75	(477.565.623,00)
2	Tambahan Penghasilan ASN	4.167.162.385,00	4.057.139.072,00	97,35	(110.023.313,00)
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan	13.352.000,00	13.351.940,00	99,99	(60,00)
4	Objektif lainnya ASN				
	Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	799.000,00	757.308,00	94,78	(41.692,00)
Jumlah Belanja Pegawai		13.287.620.000,00	12.699.989.312,00	95,58	(587.630.688,00)

- 1) Realisasi Gaji dan Tunjangan sebesar Rp.8.628.740.992,00 atau 94,75 persen dari anggarannya sebesar Rp 9.106.306.615,00. Terdiri dari :



No	Gaji dan Tunjangan ASN	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)
1	Gaji Pokok	6313.284.448,00	6243.101.040,00	98,88	(70.183.408,00)
2	Tunjangan Keluarga	610.780.077,00	587.521.512,00	96,19	(23.258.565,00)
3	Tunjangan Jabatan	131.595.000,00	120.445.000,00	91,52	(11.150.000,00)
4	Tunjangan Fungsional	490.022.976,00	432.630.000,00	88,28	(57.392.976,00)
5	Tunjangan Fungsional Umum	186.183.902,00	168.626.000,00	90,56	(17.557.902,00)
6	Tunjangan Basis	391.098.530,00	371.587.000,00	95,01	(19.511.510,00)
7	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	433.580.729,00	262.093.744,00	60,44	(171.486.985,00)
8	Pembulatan Gaji	113.000,00	97.434,00	86,22	(15.566,00)
9	Iuran Jaminan Kesehatan	479.473.447,00	391.425.823,00	81,63	(88.047.624,00)
10	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	17.282.814,00	12.803.353,00	74,08	(4.479.461,00)
11	Iuran Jaminan Kematian	52.891.692,00	38.410.066,00	72,62	(14.481.626,00)
Jumlah Gaji dan Tunjangan		9.106.306.615,00	8.628.740.992,00	94,75	(477.565.623,00)

- 2) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp 4.029.441.292,00 atau 98,02 persen dari anggarannya sebesar Rp 4.110.760.385,00. Rincian Tambahan Penghasilan PNS secara lengkap disajikan dalam tabel berikut:

No	Tambahan Penghasilan ASN	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)
1	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN	4.110.760.385,00	4.029.441.292,00	98,02	(81.319.093,00)
Jumlah		4.110.760.385,00	4.029.441.292,00	98,02	(81.319.093,00)

- 3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebesar Rp 13.351.940,00 atau 99,99 persen dari anggarannya sebesar Rp 13.352.000,00. Rincian Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN secara lengkap disajikan dalam tabel berikut :



No	Tambahan Penghasilan berdasarkan Perhitungan Objektif Lainnya/ASN	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)
1	Belanja bagi ASN atas Insentif Peningkatan Retribusi Daerah- Retribusi Jasa Usaha Perjudian Produksi	11.795.000,00	11.795.000,00	100,00	-
2	Belanja bagi ASN atas Insentif Peningkatan Retribusi Daerah- Retribusi Jasa Usaha Pemukiman Asat Daerah	1.557.000,00	1.556.940,00	99,99	
Jumlah		13.352.000,00	13.351.940,00	99,99	-

- 4) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebesar Rp 799.000,00 atau 94,78 persen dari anggarannya sebesar Rp 757.308,00. Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH secara lengkap disajikan dalam tabel berikut :

No	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)
1	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Peningkatan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	799.000,00	757.308,00	94,78	(41.692,00)
Jumlah		799.000,00	757.308,00	94,78	(41.692,00)

B. Belanja Barang dan Jasa.....Rp.12.619.146.488,00

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2025 adalah sebesar Rp.12.619,00 yang berarti mencapai 95,10 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp.13.268.686.600,00. Hal ini berarti Belanja Barang dan Jasa lebih kecil Rp.12.791.367.382,00 atau 50,33 persen jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp. 25.410.513.870,00.

Belanja Barang dan Jasa terdiri atas belanja sebagai berikut:



No	BelanjaBarangdanJasa	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih(Kurang)
1	BelanjaBarang	6.527.713.600,00	6.161.886.845,00	94,39	(365.826.755,00)
2	BelanjaJasa	4.647.829.000,00	4.481.134.550,00	96,41	(166.694.450,00)
3	BelanjaPeneliharaan	742.594.000,00	735.096.089,00	98,99	(7.497.961,00)
4	BelanjaPerjalananDinas	1.340.310.000,00	1.230.789.054,00	91,82	(109.520.946,00)
5	BelanjaUangdan/atauJasauntuk DibagikankepadaPihakKetiga/Pihak Lain/Masyarakat	10.240.000,00	10.240.000,00	100,00	-
Jumlah BelanjaBarangdanJasa		13.268.686.600,00	12.619.146.488,00	95,10	(649.540.112,00)

1. Realisasi Belanja Barang Pakai Habis sebesar Rp 6.161.886.845,00 atau 94,39 persen dari anggarannya sebesar Rp.6.527.713.600,00. Rincian selengkapnya disajikan dalam tabel berikut :



No.	Belanja Barang Pakai Habis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)
1	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	17.003.350,00	16.342.380,00	96,11	(660.970,00)
2	Belanja Bahan-Bahan Bibit/Tanaman	2.252.553.000,00	2.116.257.225,00	93,94	(136.295.775,00)
3	Belanja Bahan Isi Tabung Gas	7.080.000,00	7.080.000,00	100,00	-
4	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	94.272.000,00	94.272.000,00	100,00	-
5	Belanja Alat/Bahan untuk Keg Kantor - ATK	1.126.104.250,00	1.024.201.240,00	90,95	(101.903.010,00)
6	Belanja Alat/Bahan untuk Keg Kantor - Kertas dan Cover	83.760.000,00	83.200.000,00	99,33	(560.000,00)
7	Belanja Alat/Bahan untuk Keg Kantor - Benda Pos	16.490.000,00	16.090.000,00	97,57	(400.000,00)
8	Belanja Alat/Bahan untuk Keg Kantor - Bahan Komputer	76.560.000,00	75.630.000,00	98,78	(930.000,00)
9	Belanja Alat/Bahan untuk Keg Kantor - Perabot Kantor	28.314.000,00	25.890.000,00	91,43	(2.424.000,00)
10	Belanja Alat/Bahan untuk Keg Kantor - Alat Listrik	49.138.000,00	49.138.000,00	100,00	-
11	Belanja Alat/Bahan untuk Keg Kantor - Perlengkapan Dinas	116.932.000,00	115.723.000,00	98,96	(1.209.000,00)
12	Belanja Alat/Bahan untuk Keg Kantor - Alat/Bahan untuk Keg. Kantor Lainnya	14.436.000,00	14.436.000,00	100,00	-
13	Belanja Obat-obatan	103.400,00	103.400,00	100,00	-
14	Belanja Obat-obatan Lainnya	16.600,00	16.600,00	100,00	-
15	Belanja Natura dan Pakan-Natura	218.180.000,00	218.156.000,00	99,98	(24.000,00)
16	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.557.801.000,00	1.453.531.000,00	93,30	(104.270.000,00)
17	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	456.000.000,00	452.055.000,00	99,13	(3.945.000,00)
18	Belanja Pakaian Olahraga	412.970.000,00	399.765.000,00	96,80	(13.205.000,00)
Jumlah Belanja Barang Pakai Habis		6.527.713.600,00	6.161.886.845,00	94,39	(365.826.755,00)

2. Realisasi Belanja Jasa sebesar Rp 4.481.134.550,00 atau 96,41 persen dari anggarannya sebesar Rp 4.647.829.000,00. Rincian selengkapnya disajikan dalam table berikut :



No.	Belanja Jasa	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)
1	Belanja Jasa Kantor	2.411.847.000	2.272.440.350	94,21	(139.406.650,00)
2	Belanja Sewa Tanah	-	-	-	-
3	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	183.332.000	181.965.000	99,25	(1.367.000)
4	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	80.000.000	79.920.000	99,90	(80.000)
5	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	549.665.000	536.648.000	97,63	(13.017.000)
6	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	278.360.000	271.861.200	97,66	(6.498.800)
7	Belanja Kursus/ Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.144.625.000	1.138.300.000	99,44	(6.325.000)
Jumlah Belanja Jasa		4.647.829.000	4.481.134.550	96,41	(166.694.450)

- 1) Realisasi Belanja Jasa Kantor sebesar Rp 2.272.440.350,00 atau 94,21 persen dari anggarannya sebesar Rp 2.411.847.000,00. Rincian selengkapnya disajikan dalam tabel berikut :



No.	Belanja Jasa	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)
1	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yg tidak menghasilkan Pendapatan	14.400.000	14.400.000	100,00	-
2	Honorarium Narasumber , Moderator	117.400.000	97.530.000	83,07	(19.870.000)
3	Honorarium Penyuluhan / Pendampingan	538.080.000	515.280.000	95,76	(22.800.000)
4	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal,Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Website	57.000.000	57.000.000	100,00	-
5	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	21.120.000	21.120.000	100,00	-
6	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	15.600.000	15.600.000	100,00	-
7	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	144.400.000	144.400.000	100,00	-
8	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	218.295.000	199.773.750	91,51	(18.521.250)
9	Belanja Jasa Tenaga Operator	79.380.000	63.090.000	79,47	(16.290.000)
10	Belanja Jasa Tenaga Ahli	-	-	-	-
11	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	266.460.000	244.660.000	91,81	(21.800.000)
12	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	192.200.000	191.600.000	99,68	(600.000)
13	Belanja Jasa Tenaga Supir	15.120.000	14.040.000	92,85	(1.080.000)
14	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	15.000.000	15.000.000	100,00	-
15	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	77.100.000	77.100.000	100,00	-
16	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	20.000.000	19.980.000	99,90	(20.000)
17	Belanja Jasa Iklan/Reklame,Film dan Pemotretan	7.400.000	6.450.000	87,16	(950.000)
18	Belanja Tagihan Telpon	2.500.000	856.297	34,25	(1.643.703)
19	Belanja Tagihan Air	26.712.000	10.892.200	40,77	(15.819.800)
20	Belanja Tagihan Listrik	280.500.000	280.347.178	99,94	(152.822)
21	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	12.600.000	11.400.000	90,47	(1.200.000)
22	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV	136.500.000	126.240.925	92,48	(10.259.075)
23	Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	11.880.000	11.880.000	100,00	-
24	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	142.200.000	133.800.000	94,09	(8.400.000)
Jumlah Belanja Jasa		2.411.847.000	2.272.440.350	94,21	(139.406.650)



2) Realisasi Belanja Sewa Tanah sebesar Rp 0,00 atau 0 persen dari anggarannya sebesar Rp 0,00. Belanja Sewa Tanah terdiri dari Belanja Sewa Tanah Pertanian.

3) Realisasi Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebesar Rp 181.965.000,00 atau 99,26 persen dari anggarannya sebesar Rp 183.332.000,00. Rincian selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

No.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	53.840.000,00	53.528.400,00	99,42
2	Belanja Sewa Perkakas Konstruksi Logam	45.600.000,00	45.600.000,00	100,00
3	Belanja Sewa Mebel	-	-	-
4	Belanja Sewa Peralatan Umum	83.892.000,00	82.836.600,00	98,74
Jumlah Belanja Sewa Peralatan dan Mesin		183.332.000,00	181.965.000,00	99,25

4) Realisasi Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebesar Rp 79.920.000,00 atau 99,90 persen dari anggarannya sebesar Rp 80.000.000,00. Rincian selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

No.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)
1	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tanpa Pertanian	-	-	-	-
2	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tanpa Kerja Lainnya	80.000.000,00	79.920.000,00	99,90	(80.000,00)
Jumlah Belanja Sewa Gedung dan Bangunan		80.000.000,00	79.920.000,00	-	(80.000,00)

5) Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebesar Rp.536.648.000,00 atau 97,63 persen dari anggarannya sebesar Rp.549.665.000,00. Rincian selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:



No.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)
1	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	322.000.000,00	312.805.400,00	97,14	(9.194.600,00)
2	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa - Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	76.440.000,00	76.323.600,00	99,84	(116.400,00)
3	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa - Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	151.225.000,00	147.519.000,00	97,54	(3.706.000,00)
Jumlah Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi		549.665.000,00	536.648.000,00	97,63	(13.017.000,00)

- 6) Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Rp 271.861.200,00 atau 97,66 persen dari anggarannya sebesar Rp.278.360.000,00. Rincian selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

No.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)
1	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Tekmatika	50.960.000,00	48.673.500,00	95,51	(2.286.500,00)
2	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan - Jasa Konsultansi Manajemen	227.400.000,00	223.187.700,00	98,14	(4.212.300,00)
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi		278.360.000,00	271.861.200,00	97,66	(6.498.800,00)

- 7) Realisasi Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp.1.138.300.000,00 atau 99,44 persen dari anggarannya sebesar Rp 1.144.625.000,00. Rincian selengkapnya disajikan dalam tabel berikut :

No.	Belanja Kursus Pelatihan Sosialisasi BinteK	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)
1	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	1.072.425.000,00	1.072.425.000,00	100,00	-
2	Belanja Sosialisasi	72.200.000,00	65.875.000,00	91,23	(6.325.000,00)
Belanja Kursus Pelatihan Sosialisasi BinteK		1.144.625.000,00	1.138.300.000,00	99,45	(6.325.000,00)

3. Realisasi Belanja Pemeliharaan sebesar Rp 735.096.039,00 atau 98,99 persen dari anggarannya sebesar Rp 742.594.000,00. Rincian selengkapnya disajikan dalam tabel berikut :



No.	Belanja Pemeliharaan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)
1	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	164.320.000,00	160.144.239,00	97,45	(4.175.761,00)
2	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	578.274.000,00	574.951.800,00	99,42	(3.322.200,00)
Jumlah Belanja Pemeliharaan		742.594.000,00	735.096.039,00	98,99	(7.497.961,00)

4. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp 1.340.310.000,00 atau 91,82 persen dari anggarannya sebesar Rp.2.062.674.000,00. Rincian selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

No.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	729.190.000,00	713.197.080,00	97,80	(15.992.920,00)
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	426.850.000,00	349.032.750,00	81,76	(77.817.250,00)
3	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	26.300.000,00	26.300.000,00	100,00	-
4	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	157.970.000,00	142.259.224,00	90,05	(15.710.776,00)
Jumlah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		1.340.310.000,00	1.230.789.054,00	91,82	(109.520.946,00)

5. Realisasi Belanja Uang dan / atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Pihak Lain / Masyarakat sebesar Rp. 10.240.000,00 atau 100,00 persen dari anggarannya sebesar Rp. 10.240.000,00. Rincian selengkapnya disajikan dalam tabel berikut :

No.	Belanja Uang dan Barang/Jasa Yang Akan Diberikan Kepada Pihak ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)
1	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlindungan	10.240.000,00	10.240.000,00	100,00	-
2	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	-	-	-	-
Jumlah Belanja Uang dan Barang/Jasa Yang Akan Diberikan Kepada Pihak ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat		10.240.000,00	10.240.000,00	100,00	-

C. Belanja Hibah.....Rp. 20.975.760.547,00



Realisasi Belanja Hibah TA 2025 adalah sebesar Rp.20.975.760.547,00 yang berarti mencapai 96,36 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp.21.765.887.400,00. Hal ini berarti Belanja Hibah lebih kecil Rp.11.457.883.262.00 atau 35,32 persen jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp. 32.433.643.809,00. Belanja Hibah terdiri atas belanja Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.

Rincian selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

No.	Belanja Uang dan Barang/Jasa Yang Akan Diberikan Kepada Pihak ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)
1	Belanja Hibah Barang	21.765.887.400,00	20.975.760.547,00	96,36	(790.126.853,00)
Jumlah Belanja Uang dan Barang/Jasa Yang Akan Diberikan Kepada Pihak ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat		21.765.887.400,00	20.975.760.547,00	96,36	(790.126.853,00)

2. BELANJA MODAL.....Rp 702059.420,00

Belanja modal mencakup pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Belanja Modal meliputi pengeluaran atas perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya. Realisasi Belanja Modal TA 2025 adalah sebesar Rp 702.059.420,00 atau 96,68 persen dari anggarannya sebesar Rp 727.042.000,00.

Realisasi belanja modal terdiri dari:

No	Belanja Modal	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	178.219.000,00	157.749.820,00	88,51	(20.469.180,00)
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	335.387.000,00	333.259.300,00	99,36	(2.127.700,00)
3	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	213.436.000,00	211.950.300,00	99,30	(1.485.700,00)
Jumlah Belanja Modal		727.042.000,00	702.959.420,00	96,68	(24.082.580,00)

- 1) Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp 157.749.820,00 atau 88,51 persen dari anggarannya sebesar Rp 178.219.000,00. Rincian selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:



No.	Belanja Modal Peralatan dan Msin	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)
1	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	142.707.000,00	125.334.820,00	87,82	(17.372.180,00)
2	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	31.997.000,00	29.415.000,00	91,93	(2.582.000,00)
3	Belanja Modal Komputer	3.515.000,00	3.000.000,00	85,35	(515.000,00)
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Msin		178.219.000,00	157.749.820,00	88,51	(20.469.180,00)

- 2) Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp 333.259.300,00 atau 99,36 persen dari anggarannya sebesar Rp 335.387.000,00. Rincian selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

No.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)
1	Belanja Modal Bangunan Gedung	207.245.000,00	206.084.600,00	99,44	(1.160.400,00)
2	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasi	128.142.000,00	127.174.700,00	99,24	(967.300,00)
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan		335.387.000,00	333.259.300,00	99,36	(2.127.700,00)

- 3) Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp.211.950.300.000,00 atau 99,30 persen dari anggarannya sebesar Rp.213.436.000,00. Rincian selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

No.	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)
1	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	199.515.000,00	198.852.300,00	99,66	(662.700,00)
2	Belanja Modal Instalasi	13.921.000,00	13.098.000,00	94,08	(823.000,00)
Jumlah Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan		213.436.000,00	211.950.300,00	99,30	(1.485.700,00)

Penganggaran Belanja Modal mengikuti kebijakan akuntansi mengenai nilai minimum kapitalisasi aset tetap. Nilai minimum kapitalisasi aset tetap adalah batasan besaran minimum belanja per unit barang untuk dianggarkan sebagai Belanja Modal. Pembelian barang yang tidak memenuhi nilai minimum kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam Belanja Barang. Pada tahun anggaran 2025 belanja yang menghasilkan aset hanya berasal dari belanja modal saja, tidak terdapat kapitalisasi dari belanja pegawai. Sedangkan belanja yang tidak



memenuhi kriteria kapitalisasi sebesar Rp.0,00. Dihilangkan kepada masyarakat sebesar Rp.0,00 dan tidak ada belanja aset dengan nilai dibawah satuan minimal kapitalisasi aset tetap.

3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) / Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA).....(Rp 70.305.607.152,00)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) / Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan – LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025, Pendapatan Daerah sebesar Rp 288.575.000,00 lebih besar dibandingkan Belanja Daerah sebesar Rp 46.984.503.827,00 sehingga terjadi defisit atau Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) sebesar Rp 46.695.928.827,00.

Rincian SiKPA sebagai berikut :

No.	Uraian	Tahun 2025		Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan dan Belanja			
	Pendapatan	283.000.000,00	288.575.000,00	286.040.000,00
	Belanja dan Transfer	49.035.884.000,00	46.984.503.827,00	70.591.647.152,00
	Surplus/(Defisit)	(48.752.884.000,00)	(46.695.928.827,00)	(70.305.607.152,00)
2	Pembiayaan			
	Penerimaan Pembiayaan	-	-	-
	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-
	Pembiayaan Neto	-	-	-
	Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran	(48.752.884.000,00)	(46.695.928.827,00)	(70.305.607.152,00)